

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

Peran institusi internasional (PBB) dapat dilibatkan atas permintaan negara yang mengalami konflik, atau berdasarkan kondisi yang dapat mengancam keamanan global berdasarkan assessment yang dilakukan oleh PBB, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan pembentukan sebuah mandat resolusi. Dalam studi kasus yang diambil oleh peneliti, operasi perdamaian di Lebanon ini, PBB memberikan mandat resolusi 1701 yang menugaskan UNIFIL bertugas di wilayah *Blue Line* Lebanon selatan untuk menciptakan perdamaian sesuai mandat resolusi dalam konflik Israel-Hizbullah. Adapun beberapa landasan teori yang akan digunakan oleh penulis untuk melakukan Analisa ialah Konsep Implikasi, teori Evaluasi Kebijakan dan Teori Resolusi Konflik.

2.1.1 Konsep Keamanan Nasional

Frederick Hartman (1967) menjelaskan tentang konsep keamanan nasional sebagai kondisi terlindunginya negara dari ancaman fisik eksternal, dan memungkinkan negara siap untuk menghadapi perang (Hartman, 1967). Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang digunakan oleh negara dalam rangka memanfaatkan kekuatan dari komponen yang dimilikinya. Komponen-komponen tersebut umumnya meliputi aspek keamanan militer, aspek politik, kemasyarakatan, lingkungan, energi dan sumber daya alam, dan ekonomi yang umum disebut *element of national security*. Menurut Alan Collins (2003) keamanan nasional merupakan sebuah kebutuhan untuk menjaga ketahanan nasional melalui *element of national security* (Collins, 2003).

Kaitannya dengan penelitian ini, salah satu aspek keamanan nasional yaitu keamanan ke luar yang merujuk pada kondisi dinamis yang menjamin tegaknya kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Negara Kesatuan RI dari Ancaman luar negeri dalam rangka terciptanya Keamanan Nasional, sesuai dicerminkan dalam keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di mana kontingen Garuda yang merupakan anggota TNI sebagai komponen bangsa melaksanakan operasi pemeliharaan perdamaian (OPPD) di Lebanon melalui operasi militer selain perang (OMSP) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan terpeliharanya ketahanan nasional di berbagai bidang. Hal itu dilakukan guna melaksanakan tujuan negara sesuai dengan mandat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

2.1.2 Teori Implikasi

Teori implikasi adalah efek atau akibat yang diperoleh ketika suatu objek diproses atau diuji baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari implikasi dapat terlihat dalam jangka waktu tertentu tergantung dari periodisasi waktu. Dalam kata lain implikasi juga dapat diartikan sebagai ketelibatan, kaitan yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Beberapa ahli mengartikan implikasi sebagai segala sesuatu yang dihasilkan dari adanya proses pembuatan kebijakan atau akibat yang timbul dari pelaksanaan dan penerapan kebijakan atau kegiatan tertentu (Islamy, 2003). Dalam buku teori dan proses kebijakan publik milik Budi Winarno, ia membagi implikasi menjadi lima dimensi (Winarno, 2002), diantaranya :

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar tujuan kebijakan.

3. Kebijakan mungkin memiliki implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Hal itu diperkuat dengan pendapat milik silalahi yang menyatakan bahwa implikasi adalah akibat yang timbul dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan yang dapat berdampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijakan tersebut (Silalahi, 2005). Pada penelitian ini, jenis implikasi yang digunakan oleh peneliti ialah jenis implikasi teoritis yang bertujuan untuk mendukung dan menyakinkan peneliti mengenai keterlibatan dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dari sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori implikasi menurut winarno dengan mempertimbangkn lima dimensi implikasi untuk membantu peneliti mempertajam analisa mengenai penerapan resolusi 1701 DK PBB sebagai sebuah mandat misi perdamaian di Lebanon yang menugaskan UNIFIL dalam operasinya yang berkaitan dengan pengiriman pasukan garuda (Indonesia) kedalam sebuah misi perdamaian. Penggunaan konsep ini juga akan didukung dengan beberapa teori, diantaranya evaluasi kebijakan dan teori resolusi konflik untuk menegaskan hasil analisa yang lebih dalam dan akurat. Diharapkan penggunaan konsep implikasi ini dapat menjelaskan mengenai efektivitas penerapan resolusi 1701 DK PBB dan penugasan pasukan garuda yang berkaitan dengan politik dalam dan luar negeri Indonesia.

2.1.3 Teori Kecerdasan Budaya

Menurut Soon Ang dan Linn Van Dyne (2008), Kecerdasan budaya ialah kemampuan individu dalam memahami, berpikir dan berperilaku secara efektif dalam situasi-situasi yang terdapat perbedaan antar budaya. Soon Ang (2008) menambahkan bahwa kecerdasan budaya merupakan *state-like personality* atau kemampuan yang dapat dilatih dan diasah baik melalui pelatihan maupun melalui pengalaman di budaya yang beragam. (Ang, 2008). Terdapat empat dimensi kecerdasan budaya milik Soon Ang yang ia kemukakan meliputi,

- a. *Metacognitive*, merupakan kemampuan seseorang yang berkaitan dengan pengetahuan, serta menunjukkan seberapa luas dan dalam pengetahuan individu tentang budaya dan perbedaan-perbedaan antar budaya.
- b. *Cognitive*, merupakan kemampuan dalam berstrategi, kesadaran untuk mengembangkan dan menemukan cara serta aturan baru dalam melakukan interaksi sosial.
- c. *Motivational*, mencerminkan kemampuan seseorang untuk memberikan kontrol untuk memandang individu lain semata-mata sebagai objek yang harus digunakan untuk mencapai tujuan.
- d. *Behavioral*, kemampuan seseorang dalam menunjukkan perilaku- perilaku verbal dan non-verbal yang sesuai saat berinteraksi dengan individu lain dari budaya yang berbeda, sehingga terhindar dari kesalahpahaman dalam komunikasi dan interaksi antar budaya.

Kaitannya dengan penelitian ini Kecerdasan budaya dapat digunakan untuk mengenal, mempelajari dan beradaptasi dalam suatu komunitas baru yang memiliki perbedaan budaya. Pelaksanaan misi

pemeliharaan perdamaian oleh pasukan perdamaian yang memiliki kecerdasan budaya membantu personel atau pasukan untuk mengamati pola interaksi dan gaya komunikasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok lain sehingga dapat digunakan untuk menentukan perilaku *verbal* dan *non-verbal* yang sesuai saat berinteraksi dengan penduduk lokal dalam misi operasi maupun dengan pasukan dari negara lain, untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam komunikasi dan interaksi antar budaya. Oleh karena itu peneliti berharap penggunaan teori ini dapat membantu peneliti untuk melihat implikasi dari penerapan resolusi 1701 DK PBB terhadap kontingen Garuda XXIII-O yang bertugas pada misi perdamaian UNIFIL.

2.1.4 Teori Resolusi Konflik

Dalam *Webster Dictionary*, resolusi diartikan oleh Levine sebagai tindakan mengurangi suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan (Levine, 1998). Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama *solve a problem together* (Deutsch Morton, 2006). Lain hal dengan Simon Fisher, yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab –sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembang-kan rasa keadilan (Simon Fisher, dkk, 2001).

Resolusi konflik merupakan respon dari kondisi konflik yang mengarah pada tindak kekerasan. Sebab kekerasan dalam konflik tidak boleh dibiarkan, maka disitulah peran dari perumusan kebijakan dalam hal ini resolusi konflik untuk meredam dan menyelesaikan eskalasi konflik.

Dapat dikatakan bahwa sebuah resolusi konflik merupakan sebuah proses perdamaian. Oleh karena itu sebuah resolusi konflik akan diikuti dengan sebuah misi atau operasi perdamaian sebagai alat implementasi kebijakan guna menciptakan dan menjaga perdamaian di wilayah konflik. Dalam kasus ini, resolusi konflik yang dimaksud oleh peneliti ialah produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB (resolusi 1701) yang berisi mandat resolusi sebagai pedoman para pihak untuk menciptakan perdamaian dengan bantuan pasukan perdamaian (UNIFIL).

Studi tentang perdamaian membahas tentang cara-cara penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekuatan militer seperti negosiasi, mediasi dan diplomasi. Ketiga hal tersebut termasuk kedalam metode-metode alternatif penyelesaian konflik atau *conflict resolution*. Johan Galtung membagi perdamaian menjadi dua tipe: *positive* dan *negative peace*. Di mana *positive peace* adalah keadaan di mana tidak adanya kekerasan langsung di tingkat struktural, sedangkan *negative peace* adalah keadaan ketika kekerasan yang terjadi secara langsung sudah tidak ada lagi (Johan Galtung and Carl G. Jacobsen, 2000). Salah satu konsep yang terkait dengan proses resolusi konflik di negara-negara yang mengalami konflik adalah konsep *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding* yang ditawarkan oleh Johan Galtung, diantaranya :

a. *Peacekeeping*

Peacekeeping merupakan salah satu bagian dari pendekatan *TRANSCEND* yang diperkenalkan oleh Johan Galtung dalam menciptakan perdamaian di daerah-daerah konflik. Galtung melihat tindakan *peacekeeping* sebagai upaya menciptakan perdamaian *negative* atau tindakan untuk menghilangkan kekerasan fisik serta menjadi penjaga perdamaian yang netral (Johan Galtung, 2014).

Dalam hal ini PBB melakukan intervensi militer sebagai usahanya dalam menghentikan konflik di Lebanon. Melalui

Resolusi 1701 DK PBB tahun 2006 dan UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), tindakan ini dilakukan karena melihat konflik, di mana terjadi perselisihan antara kelompok bersenjata Hizbullah dan Israel yang menggunakan tindak kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan mereka sedangkan pemerintah Lebanon sendiri tidak dapat berbuat banyak akan hal ini. Tentu saja hal itu mengorbankan banyak jiwa dan memusnahkan segalanya. Maka dari itu perlu pasukan khusus untuk yang dapat menyelamatkan masyarakat sipil dan menjamin keamanannya.

b. *Peacemaking*

Peacemaking (menciptakan perdamaian) yaitu bentuk-bentuk intervensi untuk mengakhiri konflik dan menghasilkan kesepakatan melalui cara-cara diplomasi politik dan bila diperlukan dapat menggunakan cara militer. Atau bisa juga diartikan sebagai proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan (Hermawan, 2007).

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

c. *Peacebuilding*

Peacebuilding (menggolong perdamaian) yaitu usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan

beberapa *alternative* penyelesaian. Atau dapat juga diartikan sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian dalam artian *positive peace* di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internal, khususnya masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik efektif (Hermawan, 2007).

Konsep ini melibatkan berbagai tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi resiko timbulnya konflik ini dengan memperkuat kapasitas nasional untuk pengelolaan konflik, dan untuk meletakkan dasar keberlanjutan perdamaian dan pembangunan. *Peacekeeping* berjalan dan mendasari *peacemaking* setelah negosiasi telah berhasil disetujui dan diterapkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata dan secara tidak langsung akan bekerjasama dengan pasukan perdamaian yang ditugaskan (The Blue Helmets, 2017).

Kegiatan *peacebuilding* meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan cultural. Menurut buku *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*, definisi dari *peacekeeping* itu sendiri adalah:

“Sebuah operasi yang melibatkan personil militer namun tanpa kekuatan penegakan hukum, yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa untuk membantu memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah konflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan pada persetujuan dan kerja sama. Meskipun melibatkan personil militer, mereka mencapai tujuan mereka bukan dengan kekuatan senjata,

sehingga membedakannya dengan 'tindakan penegakan hukum' Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Pasal 42”

Berdasarkan pemahaman tersebut, *peacekeeping operation* adalah suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawah oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan global di wilayah-wilayah konflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan dan kerjasama antar negara. Di dalam pelaksanaannya, operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi tanpa penggunaan kekuatan senjata, yang berbeda dari pengertian *enforcement* PBB yang terdapat di Artikel 42. Konsep *peacekeeping operation* merujuk kepada pendekatan neoliberal institusional dan konsep *resolusi konflik* yang memiliki pengertian beberapa atau semua negara menggabungkan kekuatan dalam sebuah institusi (PBB) untuk melawan atau mencegah permasalahan global serta mencegah suatu negara agar tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk meraih keuntungannya sendiri yang merugikan negara lain.

2.2 Penelitian terdahulu yang relevan

Fenomena penelitian yang dipilih oleh peneliti bukan merupakan suatu hal yang baru. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pada penelitian ini, peneliti memerlukan referensi dari penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan perspektif baru kepada peneliti agar dapat melihat dinamika yang berkembang terkait dengan penerapan resolusi 1701 DK PBB dan implikasinya terhadap kontingen Garuda XXIII-O/UNIFIL. Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa kajian akademis yang meliputi tesis dan jurnal terdahulu yang relevan dengan topik dan objek penelitian.

Pertama penelitian thesis milik Asta Bratawijaya, “Penyelesaian Konflik Hizbullah – Israel Di Lebanon Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau Dari Hukum Internasional” Menjelaskan mengenai peranan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Lebanon dan apa usaha-usaha yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik Hizbullah-Israel di Lebanon telah berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam hukum internasional (Bratawijaya, 2008).

Kedua jurnal milik Lucia Marta, “*The UNIFIL II Mission in Lebanon: Italy’s Contribution*”. Menjelaskan mengenai kegiatan dan kontribusi pasukan Italia dalam memantau penghentian permusuhan di sepanjang perbatasan (*Blue Line*), penempatan permanen LAF di Lebanon Selatan, bantuan kepada Pemerintah Lebanon dalam mengamankan perbatasannya, dan perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. wilayah operasi (Marta, 2008).

Ketiga jurnal milik Karim Makdisi, *Constructing Security Council Resolution 1701 for Lebanon in the Shadow of the ‘War on Terror’* Memberi makna global pada perang Israel-Lebanon 2006 dan konstruksi resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengesahkan penyebaran pasukan penjaga perdamaian PBB yang kuat di Lebanon selatan (UNIFIL) (Makdisi, 2011).

Keempat jurnal milik Angga Nurdin, “Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ Unifil Tentara Nasional Indonesia Di Lebanon Selatan” Analisis praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL (Rachmat, 2016)

Kelima penelitian thesis milik Jovita A. N. Pontoh, “Analisis Pengaruh Keterlibatan Rusia Terhadap Konflik Di Suriah Dalam Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017)” Analisis konflik Suriah, resolusi konflik Rusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan resolusi konflik. Keterlibatan Rusia berhasil mende-eskalasi konflik Suriah melalui pendekatan *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Rusia

mampu meredam kekerasan di Suriah melalui jalur negosiasi. (Pontoh, 2017).

Keenam jurnal milik Ling Deng dan Paul Gibson, “*A Qualitative Evaluation on The Role of Cultural Intelligence in Cross-Cultural Leadership Effectiveness*”. Melakukan studi yang berfokus pada pengaruh budaya sebagai faktor yang rumit dalam efektivitas bisnis asing di Cina, Studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dengan menyelidiki pentingnya, dan penerapan, kecerdasan budaya (CQ) sebagai komponen kunci dari kemampuan kepemimpinan lintas budaya dalam konteks perbedaan budaya Barat-Cina. Hasilnya menunjukkan bahwa CQ pemimpin ekspatriat dapat berdampak positif pada efektivitas kepemimpinan lintas budaya, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan bisnis Australia yang beroperasi di Cina (Deng, 2008).

Tabel 2.1

No.	Nama Jurnal	Nama Penulis	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	" <i>Penyelesaian Konflik Hizbullah – Israel Di Lebanon Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Ditinjau Dari Hukum Internasional</i> " dalam Digital Repository Universitas Lampung, Februari 2008	Asta Bratawijaya	Kualitatif	Objek Penelitian: Persamaan dari thesis ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bahwa kami meneliti dan menulis objek penelitian yang sama yaitu konflik Israel-Hizbullah di wilayah Lebanon selatan.	Bratawijaya: berupaya untuk menjelaskan hal yang dilakukan PBB dalam penyelesaian konflik Hizbullah-Israel dengan bertumpu pada prinsip-prinsip hukum internasional Peneliti: berusaha menganalisa penerapan resolusi 1701 secara eksplisit dan berfokus pada efektifitas keberadaan UNIFIL sesuai mandat resolusi.

2.	<p><i>“Analisis Pengaruh Keterlibatan Rusia Terhadap Konflik Di Suriah Dalam Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017)”</i> dalam thesis Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan 2017)</p>	<p>Jovita A. N. Pontoh</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Instrument analisis :</p> <p>Instrument analisis yang digunakan oleh Pontoh dan Peneliti memiliki kesamaan ialah penggunaan metode resolusi konflik. Resolusi konflik Rusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan resolusi konflik</p>	<p>Pontoh : Analisis Konflik Suriah, Keterlibatan Rusia berhasil mende-eskalasi konflik Suriah melalui pendekatan <i>peacekeeping</i>, <i>peacemaking</i>, dan <i>peacebuilding</i>. Rusia mampu meredam kekerasan di Suriah melalui jalur negosiasi.</p> <p>Peneliti: Lokus penelitian dilakukan di Lebanon selatan mengenai misi operasi UNIFIL</p>
----	---	----------------------------	-------------------	---	---

3.	<p><i>“Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ Unifil Tentara Nasional Indonesia Di Lebanon Selatan”</i> (Vol. 12 No. 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional)</p>	Angga Nurdin	Kualitatif	<p>Objek Analisis penjaga Indonesia tergabung UNIFIL.</p>	<p>Penelitian: pasukan perdamaian yang dalam</p> <p>Nurdin :Menggunakan analisis diplomasi publik dan berfokus pada TNI sebagai UNIFIL</p> <p>Peneliti: menggunakan analisis resolusi konflik dan mencakup pendalam mengenai penerapan resolusi 1701 DK PBB sebagai legalitas penugasan UNIFIL</p>
----	--	--------------	------------	--	---

4.	<p><i>“Constructing Security Council Resolution 1701 for Lebanon in the Shadow of the ‘War on Terror’”</i> (International Peacekeeping, Vol.18, No.1, 2011)</p>	Karim Makdisi	Kualitatif	<p>Objek Penelitian: Pendalaman mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengesahkan penyebaran pasukan penjaga perdamaian PBB yang kuat di Lebanon selatan (UNIFIL).</p>	<p>Makdisi : Memberi makna global pada perang Israel-Lebanon 2006 dan konstruksi resolusi Dewan Keamanan PBB 1701</p> <p>Peneliti: menganalisa bagaimana penerapan resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB dalam menyelesaikan konflik di Lebanon selatan dan implikasi terhadap penugasan pasukan garuda</p>
----	---	---------------	------------	--	---

5.	<p><i>“The UNIFIL II Mission in Lebanon: Italy’s Contribution”</i> dalam <i>the Fondation pour la Recherche Stratégique, Paris (2008)</i></p>	Lucia Marta	Kualitatif	<p>Objek Penelitian: Melakukan Analisa terhadap misi perdamaian UNIFIL dan memberikan perspective negara yang berkontribusi</p>	<p>Marta: Memberikan pandangan mengenai misi UNIFIL dari sisi kontribusi Italy terhadap misi tersebut</p> <p>Peneliti: membahas mengenai implikasi penerapan resolusi 1701 DK PBB terhadap penugasan pasukan Garuda Satgas XXIII-O/UNIFIL</p>
----	---	-------------	------------	--	---

6.	<p><i>“A Qualitative Evaluation on The Role of Cultural Intelligence in Cross-Cultural Leadership Effectiveness”</i> (International Journal of Leadership Studies Vol.3, No.2, 2008)</p>	Ling Deng dan Paul Gibson	Kualitatif	<p>Instument Analisis : Ling Deng menggunakan unit Analisa Cultural Intelligence menggunakan metode kualitatif</p>	<p>Deng : Melakukan Analisa terhadap peran kepemimpinan dalam bisnis di Cina dari Australia</p> <p>Peneliti : Melakukan Analisa terhadap penerapan resolusi 1701 DK PBB oleh Kontingen Garuda pada Misi Pemeliharaan Perdamaian di Lebanon</p>
----	--	---------------------------	------------	---	--

2.3 Kerangka pemikiran

Perang dan konflik merupakan manifestasi dari ketidakpuasan atas suatu hal dari satu negara terhadap negara lain. Perang dan konflik antar negara (*interstate*) dapat memengaruhi dinamika keamanan dan perdamaian internasional. Penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya diselesaikan oleh negara itu sendiri ataupun dengan melibatkan peran organisasi kawasan dan institusi internasional bagi terciptanya keamanan global. Peran institusi internasional (PBB) dapat dilibatkan atas permintaan negara yang mengalami konflik, atau berdasarkan kondisi yang dapat mengancam keamanan global. UNIFIL bertugas di wilayah *Blue Line* Lebanon selatan untuk menciptakan perdamaian melalui misi operasi perdamaian yang meliputi *peacekeeping*, *peacemaking* dan *peacebuilding*. Kontingen Garuda sebagai pasukan terbanyak di pada misi UNIFIL menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan mandate resolusi, sehingga peran kontingen Garuda dapat diperhitungkan dalam rangka mendukung hasil Analisa evaluasi penerapan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 di wilayah Lebanon pada tahun 2021.

2.3 Kerangka pemikiran

